



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG INSPEKTORAT KABUPATEN

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN

2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan RidhoNya kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 tepat waktu. LKIP Inspektorat Kabupaten Deli Serdang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran serta pengelolaan sumber daya kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. LKIP Tahun 2023 menggambarkan capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, analisisnya, serta permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target.

Pencapaian target tahun 2023 ini merupakan hasil partisipasi dan kerja keras seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Pencapaian ini semoga menjadi modal untuk terus meningkatkan kinerja melalui perbaikan budaya kerja dengan mengusung nilai-nilai integritas dan profesionalisme dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Akhir kata, semoga LKIP Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan memberikan manfaat dalam penyusunan rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Lubuk Pakam, Februari 2024

INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG



H. EDWIN NASUTION, SH., M.SI., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741221 199803 1 010

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan/sasaran organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan pada masing-masing indikator tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91%≤100%	Sangat Tinggi
2	76%≤90%	Tinggi
3	66%≤75%	Sedang
4	51%≤65%	Rendah
5	≤50%	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Inspektorat tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan, Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	3,1 Level	3,178 Level	102,52	Sangat Tinggi	BPKP
	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	3,1 Level	3,178 Level	102,52	Sangat Tinggi	BPKP
		Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3 Level	2,610 Level	87	Tinggi	BPKP
2	Meningkatkan kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3,1 Level	3,00 Level	96,77	Sangat Tinggi	BPKP
	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3,1 Level	3,00 Level	96,77	Sangat Tinggi	BPKP
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai LHE AKIP Inspektorat	83 Nilai	82,19 Nilai	99,02	Sangat Tinggi	Inspektorat
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai LHE AKIP Inspektorat	83 Nilai	82,19 Nilai	99,02	Sangat Tinggi	Inspektorat
4	Meningkatkan kualitas layanan Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Nilai	89,5 Nilai	106,55	Sangat Tinggi	Inspektorat
	Meningkatnya kualitas layanan Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Nilai	89,5 Nilai	106,55	Sangat Tinggi	Inspektorat

Keterangan:

- Realisasi merupakan hasil pengolahan data
- Realisasi Nilai LHE AKIP masih menggunakan pengukuran tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2023 adalah

LKIP Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 18

sebesar 99,27% dengan kriteria sangat tinggi. 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang diperjanjikan oleh Inspektur Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 telah melebihi target, 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang diperjanjikan tidak mencapai target namun telah mencapai kinerja sangat tinggi, dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang diperjanjikan tidak mencapai target dan telah mencapai kinerja tinggi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel 3.2 di atas juga diketahui bahwa 2 (dua) indikator kinerja tujuan yang diperjanjikan oleh Inspektur Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 telah melebihi target, dan 2 (dua) indikator kinerja tujuan tidak mencapai target.

Analisis Capaian Kinerja

Adapun analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Indikator kinerja sasaran meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah:

Level Maturitas SPIP dan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor PE.09.03/LHP-1121/PW02/3.1/2023 tanggal 22 Desember 2023 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, diketahui sebagai berikut: (*Lampiran 3*)

- Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah 3,178 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3.
- Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,610 atau telah memenuhi karakteristik Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) level 2.
- Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,031 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada level 3. Indikator MRI ini tidak termasuk indikator kinerja sasaran, namun merupakan bagian dari indikator penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

Area/Komponen MRI	Skor	Nilai Komponen
Proses Manajemen Risiko	2,60	
Hasil		0,92
Aktivitas Penanganan Risiko	2,50	
<i>Outcomes</i>	4,00	
Nilai Manajemen Risiko Indeks		3,03

Sumber: Laporan BPKP Nomor PE.09.03/LHP-1121/PW02/3.1/2023

Berdasarkan rincian Nilai Manajemen Risiko Indeks pada tabel di atas diketahui bahwa area Perencanaan telah mencapai skor 3, Area Kapabilitas dan Area Hasil belum mencapai skor 3. Komponen Area Kapabilitas yang sudah mencapai skor 3 yaitu Kebijakan Manajemen Risiko, dan yang belum mencapai skor 3 yaitu Kepemimpinan, Sumber Daya Manusia, Kemitraan, dan Proses Manajemen Risiko. Komponen Area Hasil yang telah mencapai skor 3 bahkan berada pada skor 4 yaitu Outcomes, dan yang belum mencapai skor 3 yaitu: Aktivitas Penanganan Risiko.

Sasaran 2: Meningkatnya kapabilitas APIP

Indikator kinerja untuk mengukur sasaran meningkatnya kapabilitas APIP adalah:

Level Kapabilitas APIP

Berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor PE.09.03/LHP-748/PW02/6/2023 tanggal 25 Oktober 2023 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023, diketahui bahwa capaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Deli Serdang berada pada "Level 3" dengan skor "3,000". (Lampiran 4)

Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Kapabilitas

APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5 dengan penjelasan karakteristik sebagai berikut:

Tabel 3.7 Karakteristik Level Kapabilitas APIP

No	Level	Karakteristik
1	1 (<i>Initial</i>)	Organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan
2	2 (<i>Structured</i>)	APIP melaksanakan mandat pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai
3	3 (<i>Delivered</i>)	APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (<i>assurance</i> dan <i>consulting</i>) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola
4	4 (<i>Institutionalized</i>)	APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi
5	5 (<i>Optimized</i>)	APIP memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamarian aset, serta ketaatan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021

Skor Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Deli Serdang sebesar 3,00 menunjukkan karakteristik level 3 kapabilitas APIP "*delivered*". Skor level 3 (*delivered*) menunjukkan bahwa APIP Inspektorat Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E (efektif, efisien dan ekonomi), peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi pemerintah daerah.

Rincian Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat

Indikator kinerja untuk mengukur sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat adalah:

Nilai LHE AKIP Inspektorat

Berdasarkan Laporan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Nomor 700.1.2.1/LHE,SAKIP,36.1/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Inspektorat Kabupaten Deli Serdang T.A 2022, diketahui bahwa pelaksanaan SAKIP pada Inspektorat Kabupaten Deli Serdang masuk dalam kategori **MEMUASKAN** dengan predikat A (82,19). (*Lampiran 5*)

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kategori predikat nilai AKIP adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Kategori Predikat Nilai AKIP

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	nilai >90-100	Sangat Memuaskan
2	A	nilai >80-90	Memuaskan
3	BB	nilai >70-80	Sangat Baik
4	B	nilai >60-70	Baik
5	CC	nilai >50-60	Cukup (Memadai)
6	C	nilai >30-50	Kurang
7	D	nilai >0-30	Sangat Kurang

Sumber: PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021

Nilai LHE AKIP Inspektorat sebesar 82,19 menunjukkan predikat A dengan interpretasi memuaskan. Predikat A (memuaskan) menunjukkan bahwa terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. Rincian Nilai LHE AKIP Inspektorat tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Rincian Nilai LHE AKIP Inspektorat Tahun 2022

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	Nilai Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30		26,49
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	5,70	
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9	7,85	
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	12,94	
2	Pengukuran Kinerja	30		26,18
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6	5,80	
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	8,23	
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	10,5	
3	Pelaporan Kinerja	15		13,01
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja	3	2,70	
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	4,5	4,10	
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,5	6,21	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25		16,50
	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	25	16,50	
	Nilai LHE AKIP Inspektorat			82,19

Sumber: Laporan Inspektorat Kab. Deli Serdang Nomor 700.1.2.1/LHE.SAKIP.38.1/2023

Sasaran 4: Meningkatnya kualitas layanan Inspektorat

Indikator kinerja untuk mengukur sasaran meningkatnya kualitas layanan Inspektorat adalah:

Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Triwulan IV Tahun 2023, diketahui bahwa hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 89,5 nilai, menunjukkan pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Deli Sedang dengan kategori **Sangat Baik**. (Lampiran 6)

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun kategori nilai IKM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Kategori Nilai IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Palayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Pengguna jasa APIP Inspektorat didominasi oleh pihak internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima meliputi: 1) persyaratan 2) sistem, mekanisme, dan prosedur 3) waktu penyelesaian 4) biaya/tarif 5) produk spesifikasi jenis pelayanan 6) kompetensi pelaksana 7) perilaku pelaksana 8) penanganan pengaduan, saran, dan masukan 9) sarana dan prasarana. IKM sebesar 89,5 menunjukkan mutu pelayanan A dengan kinerja unit pelayanan dengan interpretasi sangat baik.

Rincian nilai IKM Inspektorat Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.12 Rincian Nilai IKM Inspektorat Tahun 2023

Unsur Pelayanan		IKM Per Unsur	Kategori
1	Persyaratan Pelayanan	3,52	B
2	Prosedur Pelayanan	3,48	B
3	Waktu Pelayanan	3,38	B
4	Biaya/Tarif Pelayanan	3,82	A
5	Produk Jenis Layanan	3,45	B
6	Kompetensi Pelaksana	3,57	A
7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,63	A
8	Sarana dan Prasarana	3,48	B
9	Penanganan Pengaduan, Saran	3,94	A
Nilai IKM		89,5	A

Sumber: Laporan SKM Inspektorat Kabupaten Deli Serdang TW IV Tahun 2023

Berdasarkan rincian Nilai SKM Inspektorat pada tabel di atas diketahui dari (9) sembilan unsur pelayanan yang dinilai, unsur waktu pelayanan mendapatkan nilai yang paling rendah dari unsur pelayanan lainnya yaitu sebesar 3,38. Unsur Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Meskipun unsur ini memiliki Nilai IKM terendah, unsur tersebut masih termasuk dalam kategori baik yaitu berada pada nilai 3,064 – 3,532. Namun karena unsur tersebut mendapatkan nilai paling rendah, maka perlu mendapatkan perhatian lebih agar tercapai pelayanan publik yang berkualitas prima sesuai dengan produk pelayanan yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Triwulan IV Tahun 2023, diketahui jenis layanan yang diukur dalam survei kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut: 1) pemeriksaan regular 2) pemantauan pemeriksaan 3) konsultasi, dan 4) pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nilai rata-rata layanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Rincian Nilai Rata-Rata Layanan

Jenis Layanan		Nilai SKM	Kategori
1	Pemeriksaan Regular	90,5	Sangat Baik
2	Pemantauan Pemeriksaan	87,5	Baik
3	Konsultasi	85	Baik
4	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	90,75	Sangat Baik
Nilai IKM		89,5	Sangat Baik

Sumber: Laporan SKM Inspektorat Kabupaten Deli Serdang TW IV Tahun 2023

Dari tabel di atas diketahui bahwa layanan pemeriksaan regular dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu mencapai nilai sangat baik, sedangkan layanan pemantauan pemeriksaan dan konsultasi mencapai nilai baik.

3.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2023 dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja 2023			Realisasi Tahun Sebelumnya		
		Target	Realisasi	% Capaian	2020	2021	2022
Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	3,1	3,178	102,52	2,65	3,018	3,052
	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3	2,610	87	-	2,870	2,870
Meningkatnya kapabilitas APiP	Level Kapabilitas APiP	3,1	3,00	96,77	2+	2	3,00

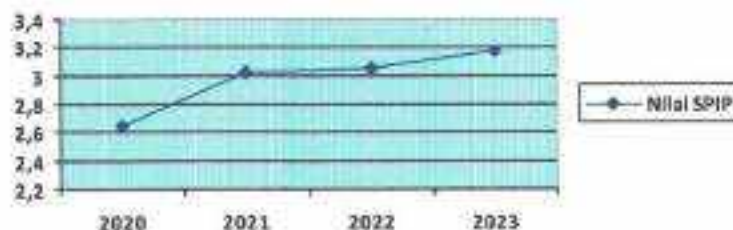
Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja 2023			Realisasi Tahun Sebelumnya		
		Target	Realisasi	% Capaian	2020	2021	2022
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai LHE AKIP Inspektorat	83	82,19	99,02	75,82	79,51	82,19
Meningkatnya kualitas layanan Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	89,5	106,55	75	81,49	83,29

Sumber : Hasil pengolahan data

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya pada tabel di atas diketahui:

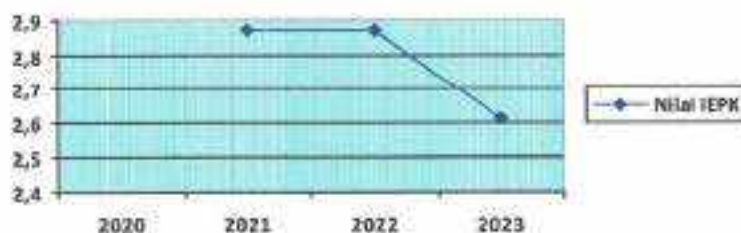
- Realisasi Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Realisasi Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,126 poin dari tahun 2022, 0,160 poin dari tahun 2021, dan 0,528 dari tahun 2020.

Gambar 3.1 Grafik Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP



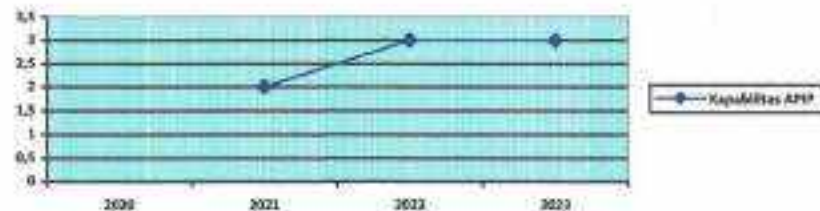
- Realisasi Indikator Kinerja Nilai IEPK tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar 0,26 poin. Pada tahun 2020 belum ada penilaian.

Gambar 3.2 Grafik Capaian Kinerja Nilai IEPK



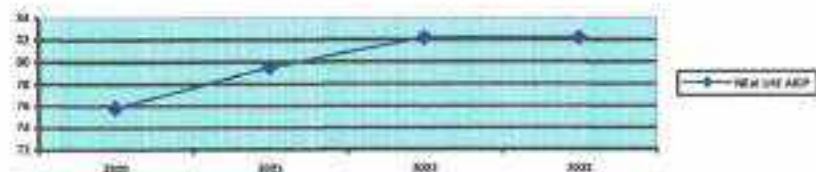
- Realisasi Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1 poin dari tahun 2020 dan 2021, namun tidak berubah dari tahun 2022.

Gambar 3.3 Grafik Capaian Kinerja Level Kapabilitas APIP



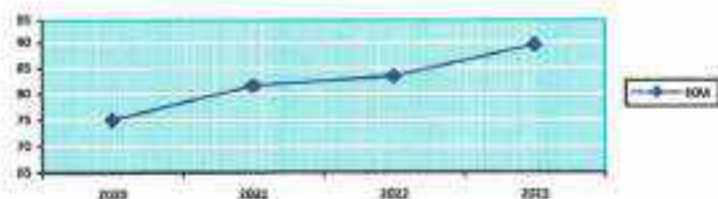
- Realisasi Indikator Kinerja Nilai LHE AKIP Inspektorat terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Realisasi Indikator Kinerja Nilai LHE AKIP Inspektorat tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,68 poin dari tahun 2021, 6,37 poin dari tahun 2020 dan tidak mengalami perubahan dari tahun 2022 karena penilaian tahun 2023 belum dilakukan.

Gambar 3.4 Grafik Capaian Kinerja Nilai LHE AKIP



- Realisasi Indikator Kinerja Nilai IKM terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Realisasi Indikator Kinerja Nilai IKM Inspektorat tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,21 poin dari tahun 2022, 8,01 poin dari tahun 2021 dan 14,5 poin dari tahun 2020.

Gambar 3.5 Grafik Capaian Kinerja Nilai IKM



3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Rencana Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Inspektorat periode tahun 2019-2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.15 Kemajuan Capaian Rencana Strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Renstra (2024)	% Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	3,178	3,2	99,31
		Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	2,610	3	87
2	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3,00	3,2	93,75
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai LHE AKIP Inspektorat	82,19	84	97,84
4	Meningkatnya kualitas layanan Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,5	85	105,29

Keterangan : Hasil pengolahan data

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir Renstra pada tabel di atas diketahui:

- Tingkat kemajuan realisasi Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP tahun 2023 terhadap target akhir Renstra sebesar 99,31% atau selisih 0,022 poin.
- Tingkat kemajuan realisasi Indikator Kinerja Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi tahun 2023 terhadap target akhir Renstra sebesar 87% atau selisih 0,39 poin.
- Tingkat kemajuan realisasi Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP tahun 2023 terhadap target akhir Renstra sebesar 93,75% atau selisih 0,2 poin.
- Tingkat kemajuan realisasi Indikator Kinerja Nilai LHE AKIP Inspektorat tahun 2023 terhadap target akhir Renstra sebesar 97,84% atau selisih 1,81 poin.
- Tingkat kemajuan realisasi Indikator Kinerja Nilai IKM Inspektorat tahun 2023 terhadap target akhir Renstra sebesar 105,29% atau telah melebihi target akhir Renstra.

3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	3,178	3	105,93
		Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	2,61	3	87
2	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3,00	3	100
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai LHE AKIP Inspektorat	82,19	71	115,76
4	Meningkatnya kualitas layanan Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,5	75,47	118,59

Keterangan : Hasil pengolahan data

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional/provinsi/kabupaten pada tabel di atas diketahui:

1. Capaian realisasi Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP tahun 2023 telah melebihi target nasional atau telah memenuhi karakteristik tingkat maturitas SPIP level 3. Adapun target nasional dalam hal ini adalah target kinerja pada Renstra BPKP Tahun 2020-2024.
2. Capaian realisasi Indikator Kinerja Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi tahun 2023 belum mencapai target nasional atau masih selisih 0,39 poin. Adapun target nasional dalam hal ini adalah target kinerja pada Renstra BPKP Tahun 2020-2024.
3. Capaian realisasi Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP tahun 2023 telah mencapai target nasional atau telah memenuhi karakteristik Kapabilitas APIP

level 3. Adapun target nasional dalam hal ini adalah target kinerja pada Renstra BPKP Tahun 2020-2024.

4. Capaian realisasi Indikator Kinerja Nilai LHE AKIP Inspektorat tahun 2023 telah melebihi target RPJMD atau telah memenuhi predikat A Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun target RPJMD dalam hal ini adalah target kinerja pada Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Dan capaian A juga telah melewati target B pada Renstra Kemenpan RB Tahun 2020-2024.
5. Capaian realisasi Indikator Kinerja Nilai IKM Inspektorat tahun 2023 telah melebihi target RPJMD. Adapun target RPJMD dalam hal ini adalah target kinerja pada Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024.

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Adapun analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi yang Telah Dilakukan

Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan (Kelemahan)	Solusi yang Telah Dilakukan
<p>Level Maturitas SPIP Target: 3,1 Realisasi: 3,178 Capaian: 102,52</p>	<p>Analisis Keberhasilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri sebagaimana ditetapkan dalam pedoman penilaian. - Penetapan sasaran strategis pada perangkat daerah telah cukup sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, berorientasi hasil, mempertimbangkan isu strategis, dan telah selaras dengan sasaran diatasnya dengan indikator dan target kinerja yang secara umum telah memenuhi kriteria SMART, sehingga unsur Kualitas Sasaran Strategis berada pada skor 4 dan unsur Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis berada pada skor 3. - Standar kompetensi telah diimplementasikan/dimanfaatkan dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D. - Peningkatan kualitas sasaran strategis dan indikator kinerja yang SMART berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi AKIP oleh KemenPANRB dan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang yang ditindaklanjuti dalam Perubahan Renstra. - Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah dengan memberikan rekomendasi perbaikan. - Melaksanakan Evaluasi Risk Register dan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah dengan memberikan rekomendasi perbaikan.

No.	Sasaran, Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang, Analisis
			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Tidak Menunjang Analisis: Tidak adanya capaian indikator kinerja karena kebijakan <i>self blocking</i> dan efisiensi belanja daerah tahun anggaran 2023.
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Menunjang Analisis: Alat kantor dan rumah tangga serta alat kantor lainnya terpelihara sehingga dapat digunakan saat memberikan pelayanan.

3.2 Realisasi Anggaran

Inspektorat Kabupaten Deli Serdang mendapat alokasi anggaran melalui APBD Perubahan tahun 2023 sebesar Rp23.879.379.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.243.667.065,00 atau mencapai 88,96%. Capaian 88,96% menunjukkan nilai kinerja anggaran Inspektorat adalah baik (lebih dari 80% sampai dengan 90%). Realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20 Capaian Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.748.652.771,00	14.712.635.070,00	87,84	100,78
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.686.006,00	69.327.000,00	99,48	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.927.805,00	41.589.700,00	99,19	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	944.305,00	942.900,00	99,85	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.813.896,00	26.794.400,00	99,93	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.304.247.939,00	12.610.916.728,00	88,16	100

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.995.114.681,00	12.302.153.628,00	87,9	98,24
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	278.018.360,00	277.781.300,00	99,91	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.114.898,00	30.981.800,00	99,57	100
	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	846.041.200,00	679.608.444,00	80,33	82
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48.750.000,00	48.750.000,00	100	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	797.291.200,00	630.858.444,00	79,13	64
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	808.963.606,00	664.209.492,00	82,11	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.375.160,00	5.349.500,00	99,52	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.883.680,00	0,00	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.758.584,00	86.953.000,00	96,87	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.740.040,00	26.724.300,00	92,99	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.357.022,00	10.660.000,00	65,11	91,79
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.732.320,00	2.314.000,00	21,56	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	577.116.800,00	532.218.692,00	92,22	108
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.410.000,00	52.200.000,00	82,32	50
	Pengadaan Mebel	53.130.000,00	52.200.000,00	98,26	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.280.000,00	0,00	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.814.020,00	367.554.152,00	96,77	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.012.000,00	5.007.000,00	99,9	107,8
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.093.440,00	63.661.152,00	85,92	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.800.000,00	0,00	0	0
	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	298.908.580,00	298.886.000,00	99,99	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.490.000,00	268.819.254,00	97,23	89,02
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253.240.000,00	247.969.254,00	97,92	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.400.000,00	0,00	0	0

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.850.000,00	28.850.000,00	100	100
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	6.266.531.167,00	5.738.028.500,00	91,57	102,52
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.840.093.783,00	4.329.580.900,00	89,45	97,5
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.214.965.910,00	1.143.886.000,00	94,15	85,16
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.407.627.596,00	1.148.408.200,00	81,58	89,37
	Reviu Laporan Kinerja	714.588.690,00	581.761.200,00	81,41	77,42
	Reviu Laporan Keuangan	35.166.450,00	31.964.000,00	90,89	100
	Pengawasan Desa	465.531.430,00	465.520.600,00	99,99	100
	Kerjasama Pengawasan Internal	114.050.859,00	113.209.500,00	99,26	100
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	888.182.848,00	844.830.600,00	95,12	100
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.426.437.384,00	1.408.447.600,00	98,74	100
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.426.437.384,00	1.408.447.600,00	98,74	92,59
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	864.195.062,00	793.003.495,00	91,76	91,88
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	12.910.196,00	12.733.500,00	98,63	96,77
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	12.910.196,00	12.733.500,00	98,63	100
	Pendampingan dan Asistensi	851.284.866,00	780.269.995,00	91,66	100
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	851.284.866,00	780.269.995,00	91,66	100

Berdasarkan pengukuran realisasi anggaran pada tabel di atas, diketahui bahwa dua program yang dilaksanakan memiliki nilai kinerja anggaran dengan kategori sangat baik (lebih dari 90%) yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan capaian sebesar 91,57% dan 91,76%, terdapat satu program yang dilaksanakan memiliki nilai kinerja anggaran dengan kategori baik (lebih dari 80% sampai dengan 90%) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 87,84%.

Dari tabel 3.19 di atas juga diketahui terdapat realisasi kinerja anggaran sub kegiatan dibawah 80% dan tidak direalisasikan (0) karena adanya kebijakan *self blocking* dan efisiensi belanja daerah tahun anggaran 2023.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting dalam laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Inspektorat Kabupaten Deli Serdang menetapkan 4 (empat) sasaran strategis pada tahun 2023 dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur kinerja sasaran. Secara umum hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Level Maturitas SPIP

Capaian indikator Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berada pada 3,178 level dengan capaian sebesar 102,52% termasuk predikat capaian kinerja sangat tinggi. Capaian 3,178 telah melebihi target 3,1 level yang telah ditetapkan, capaian 3,178 telah memenuhi karakteristik maturitas SPIP level 3 yang menjadi target nasional.

2. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Capaian indikator Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) berada pada 2,610 level dengan capaian sebesar 87% termasuk predikat capaian kinerja tinggi. Capaian 2,610 level belum mencapai target 3 level yang telah ditetapkan, capaian 2,610 belum memenuhi karakteristik Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi level 3 yang menjadi target nasional.

3. Level Kapabilitas APIP

Capaian indikator Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berada pada 3,00 level dengan capaian sebesar 96,77% termasuk predikat capaian kinerja sangat tinggi. Capaian 3,00 level belum mencapai target 3,1 level yang telah ditetapkan, namun telah memenuhi karakteristik Kapabilitas APIP level 3 yang menjadi target nasional.

4. Nilai LHE AKIP Inspektorat

Capaian indikator Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Inspektorat berada pada 82,19 nilai dengan capaian sebesar 99,02% termasuk predikat capaian kinerja sangat tinggi. Capaian 82,19 nilai belum mencapai target 83 nilai yang telah ditetapkan, capaian 82,19 nilai (A / memuaskan) telah melebihi target kinerja pada Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sebesar 71,00 nilai (BB) dan telah melewati target B (>60-70) nilai target nasional.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berada pada 89,5 nilai dengan capaian sebesar 106,55% termasuk predikat capaian kinerja sangat tinggi. Capaian 89,5 nilai telah mencapai target 84 nilai yang telah ditetapkan, capaian 89,5 nilai (A/sangat baik) telah melebihi target kinerja pada Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sebesar 75,47 nilai (B) dan telah melewati target B (76,61-88,30) nilai target nasional.

6. Capaian Kinerja Anggaran

Capaian kinerja anggaran sebesar 88,96% dimana anggaran sebesar Rp23.879.379.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.243.667.065,00. Capaian 88,96% menunjukkan nilai kinerja anggaran Inspektorat adalah baik (lebih dari 80% sampai dengan 90%). Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat sebesar 99,27%, capaian kinerja anggaran Inspektorat sebesar 88,96%, dan dikatakan **EFISIEN** karena nilai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10,97%.

Secara umum pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang memberikan dampak positif terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Deli Serdang. Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang mendukung capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2022 (lima kali berturut-turut) dari Badan Pemeriksa Keuangan, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 sebesar 71,21 (BB/Sangat Baik) dan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2023 sebesar 67,11 (B/Baik) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Rekomendasi langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan kinerjanya sebagai berikut:

1. Mendorong pelaksanaan pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang secara efektif dengan melaksanakan proses manajemen risiko bersamaan dengan proses penyusunan perencanaan.
2. Meningkatkan pengawasan pada area permasalahan atas temuan yang berulang dan pengelolaan aset secara efektif dengan memperhatikan keamanan aset baik dari secara hukum maupun fisik aset.
3. Memberi pemahaman kepada pegawai dan masyarakat terkait pelaksanaan *Whistleblowing System*.
4. Meningkatkan sosialisasi antikorupsi yang efektif bagi pegawai agar menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.
5. Menindaklanjuti rencana aksi atas *Area of Improvement (AoI)* kapabilitas APIP yang masih memerlukan perbaikan:
 - Menyusun Keputusan Pejabat Pembinaan Kepegawaian Daerah tentang penetapan hasil analisis jabatan pada APIP.
 - Menyusun Pedoman Penyusunan PKPT Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Deli Serdang berdasarkan pada Perban BPKP Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan PKPT Berbasis Risiko.
 - Melaksanakan pengawasan program lintas sektoral/lintas unit kerja (*cross-cutting programme*) berbasis risiko sebagai representasi dari pengawasan keseluruhan/makro atas GRC organisasi.
 - Melaksanakan analisis kolektif atas seluruh hasil pengawasan APIP pada rentang waktu, yang berupa *assurance* maupun *consulting* yang bervariasi, termasuk memanfaatkan hasil pengawasan eksternal maupun hasil pengawasan kolaboratif (*combined oversight/joint audit*).
 - Melaksanakan asurans atas asersi/laporan manajemen mengenai efektivitas manajemen risiko organisasi dan menguji konsistensi kesimpulan dalam asersi/laporan manajemen atas hasil penerapan GRC.

6. Meningkatkan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan melaksanakan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
7. Melaksanakan seluruh tindak lanjut perbaikan hasil survei kepuasan masyarakat:
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tugas dan beban kerja yang sedang dilaksanakan oleh petugas (APIP).
 - Melakukan evaluasi terhadap Standar Pelayanan.
 - Melakukan evaluasi dalam pemberian layanan.
 - Melakukan publikasi tentang mekanisme dan prosedur layanan di media elektronik dan non elektronik.
 - Menginventarisasi kebutuhan terhadap dukungan sarana penyelenggara publik.
 - Menyediakan sarana dan prasarana yang layak terhadap pengguna layanan serta memperhatikan sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan kinerjanya.

Lubuk Pakam, Februari 2024

INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG



H. EDWIN NASUTION, SH., M.Si., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741221 199803 1 010